

Analisis Pelaksanaan Penanganan Dan Pencegahan *Corona Virus Disease19* di Kecamatan Plaju Kota Palembang**Veronika Septiani Pardosi¹, Abdullah Idi², Mardianto³**¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia³ Universitas Sriwijaya, Indonesia*E-mail correspondence : abud413ud@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Para Petugas Pelaksana Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang, Kepala Seksi Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang, Masyarakat Kota Palembang. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang telah dilaksanakan dalam rangka menegakkan larangan mudik lebaran untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Ketupat Musi**ABSTRACT**

This study aims to evaluate the implementation of the Musi Ketupat Activities in Palembang City. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data used are quantitative and qualitative data based on the type, while primary data and secondary data are based on the source. The data collection instruments used were observation, interview and documentation. The informants in this study were the Director of Traffic of the South Sumatra Regional Police, the Musi Ketupat Activities Executive Officers in Palembang City, the Head of the Operational Section of the Palembang City Transportation Service, the Palembang City Community. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Musi Ketupat Activity in Palembang City has been carried out in order to enforce the ban on Eid homecoming to prevent the spread of the Covid-19 virus.

Keywords: Evaluation, Implementation, Ketupat Musi**PENDAHULUAN**

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas melalui penindakan hukum bagi pengendara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalulintas di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi lalulintas yang merupakan wujud dari upaya

penegakan hukum. Upaya polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu

lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Palembang, tercermin dalam tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan penggunaan sarana umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang menunaikan kewajibannya, dikarenakan adanya suatu dorongan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya.

Kota Palembang, upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui pelaksanaan operasi Ketupat Musi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Operasi Ketupat Musi biasanya dilakukan menyambut hari raya idul fitri dan mempersiapkan arus mudik tahun 2020. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) bersamaan dengan TNI dan Pemerintah Sumatera Selatan (Pemprov) menggelar apel ketupat musu di Mapolda Sumatera Selatan

Operasi ketupat musu 2020 ini sendiri akan terselenggara selama 44 hari

yang dimulai pada 24 April - 31 Mei 2020. Kegiatan ini terselenggara setiap tahun sebagai bentuk kesiapan kita menyambut hari raya idul fitri dan mempersiapkan pelayanan arus mudik 2020 yang melibatkan seluruh jajaran Kepolisian, TNI dan Lembaga Pemerintahan.

Operasi ketupat musu 2020 ini diterjunkan sebanyak 1352 personil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna mengantisipasi titik rawan kamtibmas dan pada antisipasi penyebaran Covid-19. Operasi ketupat Musu 2020 yang digelar selama 37 hari dapat berjalan dengan aman dan lancar, keberhasilan operasi ini berkat ketekunan kita semua di mana terwujudnya Siskamtibmas dengan lancar.

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi yakni sebanyak 3.513 perkara, yang meningkat di bandingkan dengan tahun 2019 yang jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.282. Targetnya adalah pengamanan jalur mudik mengantisipasi kejahatan, pencurian sepeda motor, kejahatan pencurian, kejahatan kriminal dan penyebaran Covid-19. Untuk tindakan larangan mudik di mana jumlah kendaraan yang di kembalikan Roda dua sebanyak 441 buah, roda empat sebanyak 3.130 dan bus sebanyak 153 buah. Adapun dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Musu 2020 untuk sarana yang digunakan antara lain seperti kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 6, rantis, tongkat polisi, rompi dan megaphone sedangkan prasarana yang digunakan yaitu pos-pos yang didirikan untuk pelaksanaan kegiatan penyekatan jalur mudik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Berdasarkan uraian

permasalahan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang, maka penulis tertarik mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi Ketupat Musi di Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu meliputi :

- Luasnya pengamanan Operasi Ketupat Musi, karena melibatkan tol trans sumatera dan tidak hanya terkonsentrasi dengan lalu lintas saja akan tetapi fokus juga terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban.
- Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang.
- Kurangnya personil, sarana dan prasarana di lapangan yang melaksanakan operasi.

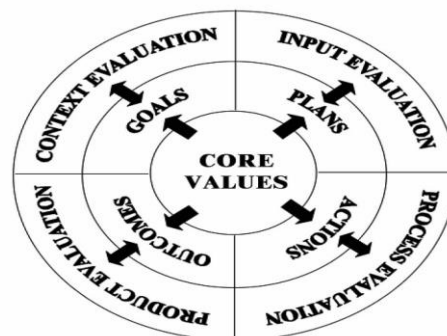
TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Stufflebeam (dalam Tayibnapi, 2008: 9) evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi (tidak hanya 1 dimensi saja) dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak/intern maupun relatif/ekstern. Model evaluasi seperti ini menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan yang sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model. (Arikunto, 2008: 40).

Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel Stuffleabem, dkk (dalam Tayibnapi, 2008: 9) di Ohio State University. Model evaluasi ini dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya.

CIPP merupakan singkatan dari,

context evaluation: evaluasi terhadap konteks, *input evaluation*: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation*: evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (Pelaksana Penganggaran) didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118) mengungkapkan bahwa, “*The CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*”. Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Berikut gambar kerangka berfikir Model Evaluasi CIPP :



Gambar .1: Model Evaluasi CIPP

Sumber: Model Evaluasi CIPP oleh Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118)

Berikut ini akan di bahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi, *context, input, process, product* :

- *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Stufflebeam (1983: 128) dalam Hamid Hasan menyebutkan, tujuan evaluasi

konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

- *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)
Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi *input*, atau evaluasi masukan. Menurut Eko Putro Widoyoko, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Menurut Stufflebeam sebagaimana yang dikutip Suharsimi Arikunto, mengungkapkan bahwa pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.
- *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)
Worthen & Sanders (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010) menjelaskan bahwa, evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan: “1) *do detect or predict in procedural design or its*

implementation during implementation stage, 2) to provide information for programmed decision, and 3) to maintain a record of the procedure as it occurs“. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

- *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil)
Sax (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010) memberikan pengertian evaluasi produk/hasil adalah “*to allow to project director (or teacher) to make decision of program*“. Dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun

modifikasi program. Sementara menurut Tayibnapis (2008: 14) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian / keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Eko Putro Widoyoko model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Ketupat Musi di Kota Palembang mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi. Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decission*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang akan di analisis dengan menggunakan dimensi model CIPP dari Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118) yang meliputi : *context, input, process, product*. Untuk menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan seperti skema berikut :

Tabel .1 Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang	• <i>Context</i>	• Tujuan kegiatan • Sasaran kegiatan
	• <i>Input</i>	• Pembentukan Panitia/Petugas Kegiatan • Sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan
	• <i>Process</i>	• Sosialisasi • Pengorganisasian • Mekanisme Usulan
	• <i>Product</i>	• Hasil kegiatan • Respon terhadap kegiatan

Sumber: Diadopsi dari model CIPP dari Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas yaitu "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang". Variabel ini bersifat mandiri karena tidak dihubungkan

dengan variabel lain. Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang, yang diadaptasi dari dimensi model CIPP dari Stufflebeam, (dalam Eko Putro Widoyoko, 2010: 118) yang meliputi, *context, input, process, product*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jajaran Polda Sumatera Selatan bersama instansi terkait dan TNI berupaya maksimal mengawal penerapan larangan mudik. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah telah menetapkan larangan mudik masyarakat, kebijakan tersebut diberlakukan mulai tanggal 24 April 2020. Untuk mengawal penerapan kebijakan itu, Polda Sumsel beserta seluruh jajaran dengan didukung TNI serta instansi terkait dan mitra Kamtibmas menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Musi 2020.

Sasaran Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui operasi Ketupat Musi 2020 juga dalam rangka upaya pihak kepolisian dalam memutus mata rantai pandemi covid-19, yang tengah mewabah. Berkaitan dengan hal tersebut, sasaran Ketupat Musi 2020 adalah orang, tempat ibadah dan kegiatan mudik. Adapun sasarannya meliputi sopir dan penumpang, pengendara sepeda motor, dan masyarakat yang akan berjualan maupun berbelanja di pasar-pasar yang ada di Kota Palembang.

Pembentukan Panitia / Petugas

Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 di Kota Palembang berjumlah 1.352 personel yang juga dibantu TNI dan aparat pemerintah setempat yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Berkaitan dengan hal tersebut, Operasi Ketupat Musi 2020 dilaksanakan mulai 24 April hingga 31 Mei 2020, operasi Ketupat Musi tahun tersebut agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi diprioritaskan untuk mencegah penularan covid-19 dengan cara menegakkan larangan mudik. Jajaran Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan Polrestabes Palembang bersama instansi terkait dan TNI berupaya maksimal mengawal penerapan larangan mudik. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19.

Pemerintah telah menetapkan larangan mudik untuk masyarakat, kebijakan tersebut sudah diberlakukan tanggal 24 April 2020 yang lalu, untuk mengawal penerapan kebijakan itu, Polda Sumsel beserta seluruh jajaran Polrestabes Palembang dengan didukung TNI serta instansi terkait lainnya menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Musi 2020. Dalam operasi Ketupat Musi 2020 pihaknya menurunkan 1.352 personel yang juga dibantu TNI dan aparat pemerintah setempat. Operasi ini juga mendirikan 59 check point, Pos Pam 41 unit dan pos pelayanan 20 unit di seluruh wilayah Sumsel.

Sumber-sumber Pendanaan dan

Pembiayaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut diketahui dana alokasi untuk program / kegiatan Ditlantas Polda Sumsel bersumber dari APBN. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan yang ada dan digunakan sesuai harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas serta ekonomis yang mana pada tahun 2020 mengeluarkan dana sebesar Rp 266.880.000,- untuk 120 personel yang terlibat operasi tersebut. Pemanfaatan dana alokasi tersebut, meliputi program / kegiatan fisik dan nonfisik. Penyusunan dan perencanaan anggaran kegiatan Ketupat Musi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 bersumber dari APBN. Penyusunan dan perencanaan anggaran kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 dilakukan melalui sosialisasi kepada pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta masyarakat umum melalui media massa baik elektronik maupun surat kabar serta media sosial lainnya. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat umum mengetahui tentang kegiatan Ketupat Musi tersebut, terutama kegiatan / operasi Ketupat Musi 2020 dilaksanakan lebih awal tidak seperti tahun sebelumnya yang dilaksanakan H-7 dan H+7 lebaran. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan / operasi Ketupat Musi dilaksanakan tanggal 24 April sampai dengan 31 Mei

2021. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, untuk itu pihak kepolisian bersama pihak terkait lainnya menghimbau kepada masyarakat untuk semaksimal mungkin tetap berada dirumah, tidak mudik lebaran dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika memang harus keluar rumah. Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi merupakan tanggung jawab pelaksana yang memerlukan komunikasi dan kerja sama yang baik. Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan sosialisasi kepada instansi maupun pihak terkait lainnya. Untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut, operasi Ketupat Musi 2020 melibatkan banyak personel tidak hanya dari Polri tetapi juga pihak terkait lainnya, baik TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Sat Pol PP Kota Palembang.

Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk mencapai suatu pelaksanaan yang efektif perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak terkait. Koordinasi yang terjalin antar instansi / pihak terkait lainnya berjalan dengan baik, instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 di Kota Palembang tersebut dapat menjalankan tugasnya dan bekerja sama. Koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan ini dengan efektif mempengaruhi tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang telah melaksanakan tupoksinya masing-masing sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Usulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan Ketupat Musi adalah kegiatan yang dilakukan Polri untuk mengamankan jalur mudik pada masa lebaran. Kegiatan Ketupat Musi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga kegiatan Ketupat Musi sudah menjadi program kerja yang dilaksanakan oleh Polri. Perencanaan kegiatan Ketupat Musi dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme usulan kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya, dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah.

Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Operasi Ketupat Musi 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena terjadinya pada saat pandemi Covid-19, jajaran Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang bersama instansi terkait pemerintah dan TNI berupaya maksimal mengawal penerapan larangan

mudik. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah telah menetapkan larangan mudik untuk masyarakat, kebijakan tersebut sudah dikeluarkan atau diedarkan ke seluruh provinsi pada tanggal 24 April 2020. Maka dari itu Untuk mengawal penerapan kebijakan itu, Polda Sumsel beserta seluruh jajaran Polrestabes Palembang dengan didukung TNI serta instansi terkait lainnya menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Musi.

Respon Terhadap Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum masyarakat menerima dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebara covid-19 pada hari Raya Idul Fitri 2020 dengan cara memberlakukan larangan mudik lebaran. Upaya tersebut dilakukan petugas dengan mendirikan pos penjagaan dan pengamanan Ketupat Musi 2020 dengan didukung personil baik dari Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya seperti Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan.

Petugas juga memberlakukan putar balik kendaraan yang akan memasuki wilayah Kota Palembang, meskipun kendaraan yang diminta putar balik tersebut selalu mempunyai alasan untuk mengelabui petugas. Akan tetapi apapun alasan yang mereka utarakan tetap diminta putar balik karena sesuai dengan imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Sejumlah kendaraan yang diimbau untuk putar balik berasal dari jalan tol maupun jalan lintas.

Pelaksanaan Kegiatan Ketupat Musi di Kota Palembang diketahui bahwa

tercatat 3724 kendaraan yang masuk dan keluar di perbatasan Sumatera Selatan putar balik ke daerah asal selama Operasi Ketupat Musi 2020 yang di gelar Direktorat Polda Sumsel. Dari 3724 kendaraan yang diputar balik itu, sebanyak 441 sepeda motor, 3.130 mobil, dan 153 bus. Operasi Ketupat Musi 2020, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya operasi ketupat musu, petugas menjaga, mengawal, mengamankan dan mengayomi serta melayani masyarakat yang akan mudik, maka pada tahun 2020 petugas mencegah agar masyarakat tidak melakukan mudik lebaran karena sedang dilanda covid-19.

Operasi Ketupat Musi dilaksanakan selama 37 hari mulai 24 April sampai 31 Mei 2020. Tujuan operasi Ketupat Musi 2020 tersebut, untuk membantu mencegah penyebaran virus covid-19 dengan cara mencegah masyarakat untuk mudik lebaran. Dalam operasi Ketupat Musi 2020, seluruh jajaran Satlantas telah mendirikan 59 unit pos pengamanan, 41 pos check point dan 20 pos pelayanan. Hal ini bertujuan agar pengendara tidak bisa masuk ke suatu kota atau kabupaten tanpa ada kepentingan yang mendesak. Operasi Ketupat Musi 2020, setidaknya melibatkan 17 Polres dengan menerjunkan 1.352 personel. Untuk berjaga di pos, operasi ini juga melibatkan TNI, Satlpol PP dan Dinkes dan instansi lainnya untuk bersiaga 24 jam. Selama operasi Ketupat Musi tersebut juga diketahui bahwa kecelakaan selama Operasi Ketupat Musi meningkat tajam setidaknya ada 34 luka ringan dan 7 luka berat.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersumber dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang

tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas, tetapi itu juga di sebabkan oleh kondisi jalan dan bencana alam. Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program keselamatan dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak seperti masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya, pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian telah melakukan upaya preventif hingga represif yang dimulai dari penyebaran lembar peringatan kepada pengguna jalan, pemasangan rambu lalu lintas, spanduk yang berisi rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang di tempatkan pada tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas telah sedemikian rupa mengatur pelaksanaan Penanganan kecelakaan bagi kepolisian sebagai upaya untuk mengendalikan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Berbagai upaya pemikiran dan pelaksanaan sistem penanganan kecelakaan lalu lintas dalam kepolisian maupun lintas sektor antar instansi yang bersangkutan dengan penyebab kecelakaan lalu lintas pada dasarnya sudah dilaksanakan. Penanganan tersebut dilakukan melalui pendekatan sosial seperti melakukan himbauan kepada masyarakat secara langsung,

penertiban kendaraan bermotor seperti melakukan razia kelengkapan standar kendaraan, peningkatan pelayanan dalam hal ini proses pembuatan surat izin mengemudi agar para calon pengendara benar-benar memenuhi syarat berkendara. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi, mulai dari kesalahan atau kelalaian pengemudi bahkan korban sampai pada keteledoran pemerintah setempat dalam mengatur kualitas dan kuantitas manajemen jalan raya di daerahnya. Hal ini tentunya harus direspon oleh petugas kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan melakukan penegakkan hukum pidana lalu lintas.

KESIMPULAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 adalah orang, tempat ibadah dan kegiatan mudik. Adapun sasarannya meliputi sopir dan penumpang, pengendara sepeda motor, dan masyarakat yang akan berjualan maupun berbelanja di pasar-pasar yang ada di Kota Palembang.

Pembentukan panitia / petugas kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 di Kota Palembang. Jajaran Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang bersama instansi terkait dan TNI berupaya maksimal mengawal penerapan larangan mudik. Dalam operasi Ketupat Musi 2020 pihaknya menurunkan 1.352 personel yang juga dibantu TNI dan aparat pemerintah setempat. Operasi ini juga mendirikan 59 check point, Pos Pam 41 unit dan pos pelayanan 20 unit di seluruh wilayah Sumsel.

Sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan, penyusunan dan

perencanaan anggaran kegiatan Ketupat Musi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 bersumber dari APBN.

Sosialisasi, proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 dilakukan melalui sosialisasi kepada pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta masyarakat umum melalui media massa baik elektornik maupun surat kabar serta media sosial lainnya. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat umum mengetahui tentang kegiatan Ketupat Musi tersebut, terutama kegiatan / operasi Ketupat Musi 2020 dilaksanakan lebih awal tidak seperti tahun sebelumnya yang dilaksanakan H-7 dan H+7 lebaran.

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 sudah terlaksana dengan baik, pada kegiatan tersebut koordinasi dilakukan baik internal maupun eksternal. Koordinasi internal di lingkungan Ditlantas Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang. Koordinasi ini dilaksanakan baik secara vertikal maupun horizontal. Berkaitan dengan hal tersebut, ada koordinasi yang baik diantara petugas yang bertugas. Setiap petugas yang bertugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Koordinasi eksternal yang terjalin antar instansi / pihak terkait lainnya berjalan dengan baik, instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketupat Musi 2020 di Kota Palembang tersebut dapat menjalankan tugasnya dan bekerja sama.

Mekanisme usulan kegiatan, Ketupat Musi adalah kegiatan yang

dilakukan Polri untuk mengamankan jalur mudik pada masa lebaran. Kegiatan Ketupat Musi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga kegiatan Ketupat Musi sudah menjadi program kerja yang dilaksanakan oleh Polri. Perencanaan kegiatan Ketupat Musi dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme usulan kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya, dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah.

Hasil kegiatan, operasi Ketupat Musi 2020 dilaksanakan 24 April sampai 31 Mei 2020. Sebanyak 3,724 kendaraan dipaksa untuk putar balik selama Operasi Ketupat Musi 2020. Kendaraan yang disuruh putar balik meliputi sepeda motor, mobil, dan bus yang akan masuk Sumatera Selatan termasuk juga menuju Kota Palembang. Lebih rinci dikatakannya, ada 441 sepeda motor, 3.130 mobil, dan 153 bus yang diputar balik. Tidak hanya itu kecelakaan selama Operasi Ketupat Musi meningkat tajam setidaknya ada 34 luka ringan dan tujuh luka berat.

Respon terhadap kegiatan, secara umum masyarakat menerima dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebara covid-19 pada hari Raya Idul Fitri 2020 dengan cara memberlakukan larangan mudik lebaran. Petugas juga memberlakukan putar balik kendaraan yang akan memasuki wilayah Kota Palembang, meskipun kendaraan yang diminta putar balik tersebut selalu mempunyai alasan untuk mengelabui petugas. Akan tetapi apapun alasan yang mereka utarakan tetap diminta putar balik karena sesuai dengan imbauan pemerintah untuk tidak mudik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B. 1990. Perencanaan dan Evaluasi (PDE). Jakarta: Bumi Aksara
- Dimas Mukti Wibowo 2018. Strategi Program Operasi Simpatik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Taman
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press
- L.Stufflebeam, Daniel and Anthony J.Shinkfield. 2007. Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: A Wiley Imprint
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Mohammad subhan Nur Fazry 2019. Peran Satlantas Polresta Samarinda dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 43 Tahun 1993. Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.
- Siagian, Sondang P. 2013. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Strauss, A and J. Corbin. 1990. Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and. Techniques. London: Sage Publication
- Sugiyono. 1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Suryosubroto. 2004. Metodologi Penelitian untuk Public Relations. Bandung: Simbiosia
- Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Tayibnapi, Farida, Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta. Rineka Cipta

Undang-Undang No 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Wahab, Solihin Abdul. 2008. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik. Malang:
UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah

Widoyoko, Eko Putro S. 2010. Evaluasi
Program Pembelajaran (Panduan
Praktis bagi Pendidik dan Calon
Pendidik). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik:
Teori dan Proses Edisi Revisi.
Yogyakarta: Media Presindo.